



PEMERINTAH KABUPATEN

JEMBER

RENCANA STRATEGIS

RENSTRA

TAHUN 2025 - 2029

**Badan Perencanaan Pembangunan
Riset dan Inovasi Daerah**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kabupaten Jember dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta perubahannya. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah.

Jember, 2025
Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Jember

ARIEF TYAHYONO, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19661015 199602 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR GAMBAR	7
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	Error! Bookmark not defined.
1.3 Maksud dan Tujuan.....	14
1.4 Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	19
2.1 Gambaran Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah.....	Error! Bookmark not defined.
2.1.2 Sumber daya Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	Error! Bookmark not defined.
2.1.3 Kinerja pelayanan (Nama Perangkat Daerah/termasuk capaian SPM)	Error! Bookmark not defined.
2.1.4 Kelompok sasaran layanan	Error! Bookmark not defined.
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah.....	21
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah.....	Error! Bookmark not defined.
2.2.2 Isu Strategis	Error! Bookmark not defined.
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	32
3.1 Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	32
3.2 Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	32
3.3 Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	32
3.4 Arah Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	40

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	37
4.1 Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Program, Kegiatan dan Subkegiatan.....	32
4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan	32
4.3 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; 32	
4.4 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025- 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).	40
BAB V PENUTUP	37
5.1 Kesimpulan penting substansial.....	40
5.2 Kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi (terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah)	40

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Kesimpulan penting substansial	40
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan	33
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember.....	35
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Logical Framework Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember.....	42
Gambar 4.2 Cascading	334

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 ayat (1) dan ayat (2), disebutkan bahwa Perangkat Daerah Menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Jember berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jember berkaitan dengan Urusan Perencanaan dan Urusan Penelitian dan Pengembangan.

Dalam menyusun Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jember.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta perubahannya. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah harus menyesuaikan nomenklatur indikator subkegiatan selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 beserta perubahannya. tersebut memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator subkegiatannya yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan dengan targetnya sesuai dengan indikator subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta perubahannya.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Perpu nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2029* (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Perpu nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2029* (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi

Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

- Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomo 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D)
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 5)

30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Jember sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;

5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

2.1 Gambaran Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

2.1.1 Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

2.1.2 Sumber daya Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

2.1.3 Kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah /termasuk capaian SPM)

2.1.4 Kelompok sasaran layanan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan, Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

2.2.2 Isu Strategis

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Jember beserta indikator kinerjanya serta rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam lima tahun mendatang.

- 3.1 Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
- 3.2 Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
- 3.3 Strategi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
- 3.4 Arah Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

BAB VI. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Jember, serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jember.

- 4.1 Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif Program, Kegiatan dan Sub kegiatan
- 4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan
- 4.3 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 4.4 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

- 5.1 Kesimpulan penting substansial
- 5.2 Kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi (terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah)

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Jember tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) merupakan salah satu Perangkat Daerah yang unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan bidang inovasi.

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Invensi dan Inovasi secara berkelanjutan, serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Bapperida Kabupaten Jember meyelenggaraan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah;
- e. pelaksanaan administrasi Badan di bidang perencanaan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Susunan organisasi Bapperida beserta uraian tugas dari setiap unsur organisasi yaitu sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bapperida Kabupaten Jember. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Badan;
- b. pengkoordinasian kegiatan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- c. pengkoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara;
- d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi

ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan;

- e. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan;
- g. pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran di Badan;
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Sekretariat;
- i. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat terdiri atas :

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;
 - b. menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan Badan;
 - c. menyiapkan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan Badan serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
 - d. menyiapkan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
 - e. menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan di lingkungan Badan;
 - f. menyusun rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
 - g. melaksanakan pelayanan administrasi dan melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor;
 - h. melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah;
 - i. melaksanakan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;

- j. mengelola layanan administrasi kepegawaian dan pengembangan kompetensi aparatur di unit kerja;
 - k. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - l. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud, mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan bahan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan Badan;
 - b. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data informasi Badan;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan input data pada system informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
 - d. mengumpulkan bahan dan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban Badan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. mengkoordinasikan penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja lingkup Badan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - h. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas merumuskan

kebijakan teknis, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah urusan bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam dan mengkoordinasikan pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- j. pelaksanaan asistensi, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- l. pengoordinasian dan fasilitasi kemitraan pemerintah dengan swasta dalam

- pelaksanaan CSR;
- m. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- n. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- o. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah urusan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang

- pemerintahan dan pembangunan manusia;
- f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - j. pelaksanaan asistensi, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - l. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - m. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - n. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah urusan bidang infrastruktur dan kewilayahan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam

melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- j. pelaksanaan asistensi, monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kabupaten bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- l. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- m. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- n. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah urusan bidang infrastruktur dan kewilayahan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan Pembangunan daerah
- b. pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- c. pelaksanaan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- d. pelaksanaan pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- e. pelaksanaan perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah
- f. pengoordinasian dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- h. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- i. pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- j. penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;

- k. pelaksanaan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- o. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.
- p. pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- q. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- r. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- s. pemantauan , evaluasi dan pelaporan di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- t. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Bidang Riset dan Inovasi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidang Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Invensi dan inovasi di daerah;
- e. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah;
- f. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- g. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ organisasi penelitian lainnya di daerah;
- h. pelaksanaan koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Riset dan Inovasi daerah;
- j. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Riset dan Inovasi Daerah terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan fungsi Bapperida Kabupaten Jember harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Bapperida Kabupaten Jember.

Berdasarkan data kepegawaian Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten Jember pada Juni 2025 jumlah Aparatur Sipil Negara sebanyak 40 Orang, yang terdiri dari:

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon II/b	1
2	Eselon III/a	1
3	Eselon III/b	4
4	Eselon IV/a	2
Jumlah		

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Dari data di atas dapat disampaikan bahwa di Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah terdapat 1 (satu) orang eselon II/b, 1 (satu) orang eselon III/a, dan 4 (empat) orang eselon III/b, dan 2 (dua) orang eselon IV/a

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

No	Gol.Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
	Golongan IV/c	1	0	1
	Golongan IV/b	0	0	0
1	Golongan IV/a	4	2	6
2	Golongan III/d	6	3	9
3	Golongan III/c	1	1	2
4	Golongan III/b	2	0	2
5	Golongan III/a	5	7	12
6	Golongan II/d	1	0	1
7	Golongan II/c	0	0	0
8	Golongan II/b	1	0	1
9	Golongan II/a	0	0	0
10	PPPK	5	1	6
11	Non ASN (PPPK Paruh Waktu)	9	2	11
	Jumlah	34	16	51

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab Jember Tahun 2025

Dari data di atas dapat disampaikan bahwa Pegawai pada Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah terdiri dari : 1 (satu) Orang Golongan IV/c, 6 (enam) Orang Golongan IV/a, 9 (Sembilan) Orang Golongan III/d, 2 (dua) Golongan III/c, 2 (dua) Orang Golongan III/b, 12 (dua belas) Orang Golongan III/a, 1 (satu) Orang Golongan II/d, 1 (satu) Orang Golongan II/b, 6 (enam) Orang PPPK, dan terdiri dari 11 (sebelas) Orang Non ASN (yang sedang berproses menjadi PPPK paruh waktu).

Gambaran ASN pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menurut latar belakang pendidikan yang ditamatkan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Magister S-2	5	4	9
2.	Sarjana S-1	17	9	26
3.	Diploma III	2	0	2
4.	SLTA	10	3	13
5.	SLTP	1	0	1
6.	SD/ sederajat	0	0	0
Jumlah		35	16	51

Sumber: Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab Jember Tahun 2025

Dari data di atas dapat disampaikan bahwa Pegawai pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah terdiri dari 9 (sembilan) Orang lulusan Magister S-2, 26 (dua puluh enam) Orang lulusan Sarjana S-1, 2 (dua) orang lulusan Diploma III, 13 (tiga belas) orang lulusan SLTA dan 1 (satu) orang lulusan SLTP.

Untuk menjalankan operasional tugas pokok dan fungsi, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember difasilitasi sejumlah asset sebagai sarana dan prasarana pendukung tugas fungsi organisasi. Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Bapperida Kabupaten Jember per 1 Januari 2025 sebesar Rp. 7.379.664.050,00,- (Tujuh Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Jumlah Aset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai

No	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Keterangan	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	Tanah	-	-		-	-	
2	Peralatan dan Mesin	560	5.350.252.700,00		-	-	

3	Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-
5	Aset Tetap lainnya	5	2.376.000,00	-	-	-	-
6	Konstruksi dlm Pengerjaan	-	-	-	-	-	-
7	Aset Lainnya	205	2.027.035.350,00	-	-	-	-
JUMLAH		770	7.379.664.050,00				

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab Jember Tahun 2025

C. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember

Kinerja Bapperida meliputi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Inovasi dan Inovasi secara berkelanjutan. Pada periode Renstra 2021-2026 Urusan Perencanaan dan Pembangunan memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu perencanaan dan pengendalian pembangunan wilayah, dengan harapan hasilnya dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat setempat. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Bapperida Kabupaten Jember telah menetapkan kebijakan untuk memperkuat dan memantapkan proses perencanaan, pengendalian, dan pengawasan pembangunan. Adapun capaian kinerja pelayanan Bapperida Kabupaten Jember dapat dilihat pada table dibawah ini.

TABEL 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember

No.	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran)	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian Tahun Ke - (Persentase)			
					(2022)	(2023)	(2024)		(2022)	(2023)	(2024)		(2022)	(2023)	(2024)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(11)	(12)	(13)		(16)	(17)	(18)	
1	Penilaian / Evaluasi SAKIP komponen perencanaan kinerja				21,93	22,45	23		22,2	21,87	21,94		101,23%	97,42%	95,39%	
2	Penilaian / Evaluasi SAKIP komponen pengukuran kinerja				14,92	14,97	18		17,44	17,25	17,36		116,89%	115,23%	96,44%	
3	Persentase Sasaran Pembangunan Daerah Yang Tercapai				75%	75%	80%		75%	75%	100%		100,00%	100,00%	125,00%	

No.	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran)	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian Tahun Ke - (Persentase)			
					(2022)	(2023)	(2024)		(2022)	(2023)	(2024)		(2022)	(2023)	(2024)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(11)	(12)	(13)		(16)	(17)	(18)	
4	Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD				89%	90%	91%		90%	90%	91%		101,12%	100,00%	100,00%	
5	Persentase keselarasan Renja PD dengan RKPD				89%	90%	91%		90%	90%	91%		101,12%	100,00%	100,00%	
6	Indeks Inovasi Daerah				58,72	59,12	59,62		58,72	57,97	71,09		100,00%	98,05%	119,24%	
7	Nilai SAKIP OPD				BB	BB	BB									
8	Persentase Indikator Program yang tercapai				100 %	100 %	100 %		93%	92%	88%		93,00%	92,00%	88,00%	

Dari sajian tabel di atas dapat dilihat bahwa kinerja perencanaan dan pengukuran kinerja dalam lingkup perangkat daerah selama periode tahun 2022–2024 menunjukkan capaian yang cukup baik. Beberapa indikator bahkan mencatatkan realisasi capaian yang melebihi target yang telah ditetapkan. Misalnya, pada indikator Penilaian/Evaluasi SAKIP komponen perencanaan kinerja, meskipun capaian cenderung menurun dari tahun ke tahun, pada tahun 2022 indikator ini mencapai rasio 101,23% terhadap target. Penurunan capaian di tahun 2023 dan 2024 hingga menjadi 95,39% dipengaruhi oleh dinamika implementasi kebijakan perencanaan serta peningkatan standar evaluasi.

Indikator Penilaian/Evaluasi SAKIP komponen pengukuran kinerja juga menunjukkan performa yang sangat baik, terutama pada tahun 2022 dan 2023 dengan capaian di atas 115%. Namun, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan capaian menjadi 96,44%, yang masih tergolong tinggi meskipun berada di bawah target.

Sementara itu, indikator Persentase Sasaran Pembangunan Daerah yang Tercapai menunjukkan capaian maksimal bahkan melebihi target pada tahun 2024 dengan persentase 125%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembangunan daerah telah berjalan efektif dan efisien. Capaian ini tidak terlepas dari sinergi lintas sektor serta penguatan pengendalian dan evaluasi program secara berkala.

Untuk indikator keselarasan dokumen perencanaan, seperti Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD dan Renja PD dengan RKPD, capaian pada ketiga tahun selalu mencapai atau melebihi target. Hal ini mencerminkan konsistensi perencanaan di tingkat daerah serta efektivitas koordinasi antar perangkat daerah.

Pada indikator Indeks Inovasi Daerah, terlihat peningkatan signifikan terutama pada tahun 2024 yang mencapai 119,24% dari target. Capaian ini menunjukkan bahwa daerah semakin adaptif dan responsif dalam mendorong inovasi, baik dari segi pelayanan publik maupun tata kelola pemerintahan.

Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum dapat dinilai capaiannya, seperti Nilai SAKIP OPD dan Persentase Indikator Program yang Tercapai, yang tidak memiliki data realisasi pada periode tersebut. Hal ini menjadi catatan penting untuk penyempurnaan pengumpulan dan pelaporan data kinerja ke depan.

Pada indikator Persentase Indikator Program yang Tercapai selama periode 2022–2024 menunjukkan kinerja yang relatif tinggi meskipun belum sepenuhnya mencapai target 100%. Pada tahun 2022 tercatat sebesar 93%, kemudian 92% pada tahun 2023, dan 88% pada tahun 2024. Angka tersebut menggambarkan bahwa sebagian besar indikator program tetap dapat direalisasikan sesuai perencanaan, dengan tingkat capaian di atas 85%. Hal ini mencerminkan komitmen dan konsistensi perangkat daerah dalam melaksanakan program meskipun menghadapi berbagai dinamika dan tantangan.

Secara umum, capaian indikator-indikator tersebut mencerminkan adanya komitmen yang kuat dari perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program dan kegiatan. Dukungan anggaran yang memadai, kolaborasi lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi menjadi faktor pendukung utama dalam pencapaian kinerja tersebut.

Kinerja pelayanan Bapperida Kabupaten Jember selain dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana tercantum dalam Renstra Bapperida Kabupaten Jember, juga dapat diukur melalui kinerja anggaran. Adapun realisasi dan rasio anggaran dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut:

**Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Perencanaan
Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember**

Uraian Program	Anggaran Pada Tahun-					Realisasi Anggaran Pada Tahun-					Rasion Antara Realisasi dan Anggaran Tahun-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)			(2022)	(2023)	(2024)			Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.971.880.663	9.372.004.396	8.841.949.954			6.955.078.774	7.973.250.900	7.122.391.680			87,25%	85,08%	80,55%			11,91%	2,41%
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.088.520.691	2.550.794.900	3.464.209.200			1.675.772.763	1.989.153.391	2.127.896.063			80,24%	77,98%	61,43%			65,87%	26,98%
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.392.524.049	3.027.000.360	3.438.390.180			2.193.801.931	2.223.425.653	2.527.591.823			64,67%	73,45%	73,51%			1,35%	15,22%
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.616.633.653	2.643.624.100	2.142.181.000			1.084.611.200	2.520.910.907	895.376.684			67,09%	95,36%	41,80%			32,51%	-17,45%

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab Jember Tahun 2025

D. Kelompok Sasaran Layanan

Program-program yang dilaksanakan oleh Bapperida Kabupaten Jember merupakan program yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Rencana program beserta indikator program untuk masing-masing program ini sedekat mungkin didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Bapperida Kabupaten Jember. Indikator program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome program merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk penerima manfaat atau kelompok sasaran (beneficiaries) tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kegiatan – kegiatan yang dipilih untuk setiap program, merupakan kegiatan yang menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Bidang pada Bapperida Kabupaten Jember. Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan diharapkan dapat menjawab berbagai isu strategis dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah kabupaten Jember, khususnya pada lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember.

Kelompok sasaran atau penerima manfaat atas program-program yang dilaksanakan Bapperida Kabupaten Jember secara langsung adalah Perangkat Daerah pada lingkup Pemerintah Kabupaten Jember. Sedangkan secara tidak langsung, manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Jember.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.7 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan
Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah**

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Kualitas Perencanaan Belum Optimal	1. Dokumen perencanaan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan potensi daerah 2. Penyusunan perencanaan belum berbasis data dan analisis mendalam	1. Data sektoral yang belum mutakhir
			2. Keterbatasan kompetensi teknis SDM dalam perencanaan berbasis evidence
			3. Perubahan kebijakan nasional yang tidak cepat direspons ke dalam perencanaan daerah
			4. Kurangnya pelatihan teknis tentang pendekatan pembangunan berkelanjutan dan inovatif
2	Sinkronisasi Program Antar-Perangkat Daerah Lemah	1. Koordinasi lintas sektor yang belum berjalan efektif	1. Belum optimalnya pelaksanaan forum koordinasi berkala yang produktif
			2. Lemahnya pengawasan internal dan harmonisasi lintas bidang
3	Capaian Kinerja Pembangunan Tidak Konsisten	1. indikator kinerja daerah tidak menunjukkan tren peningkatan yang konsisten 2. tidak tercapainya beberapa target indikator makro	1. Kurang tajamnya indikator kinerja dalam dokumen perencanaan
			2. Lemahnya sistem monitoring dan evaluasi pembangunan
			3. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan hingga pengawasan
4	Keterbatasan Pemanfaatan Riset dan Data dalam Perencanaan	1. hasil riset dan data ilmiah tidak dijadikan dasar utama dalam perumusan kebijakan 2. belum adanya kebijakan daerah yang berbasis penelitian lokal	1. Belum optimalnya sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga litbang/perguruan tinggi
			2. Kurangnya anggaran khusus untuk penelitian terapan daerah
			3. Belum tersedia platform berbagi hasil riset yang terintegrasi dengan sistem perencanaan
5	Inovasi Daerah Belum Terinstitusionalisasi	1. belum banyak inovasi yang dikembangkan dan	1. Budaya birokrasi yang masih konservatif dan kurang adaptif

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		diadopsi dalam pelayanan publik dan kebijakan 2. stagnansi inovasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah	2. Kurangnya sistem penghargaan atau insentif bagi inovator internal 3. Minimnya kapasitas SDM dalam hal design thinking, inovasi sosial, dan digitalisasi
6	Sistem Evaluasi dan Feedback Kurang Efektif	1. hasil evaluasi pembangunan belum dijadikan dasar perbaikan perencanaan 2. feedback dari stakeholders tidak terakomodasi dengan baik	1. Sistem pelaporan kinerja belum cukup interaktif dan responsif 2. Kurangnya ruang partisipasi publik dan akademisi dalam mengevaluasi program pembangunan 3. Evaluasi hanya bersifat administratif dan tidak menyentuh efektivitas program
7	Lemahnya Kapasitas dan Kompetensi SDM	1. perencana yang belum menguasai metodologi perencanaan modern 2. pelatihan dan pengembangan kapasitas tidak merata	1. Tidak ada kurikulum pelatihan berkelanjutan untuk perencana 2. Terbatasnya akses SDM terhadap pelatihan online atau platform digital 3. Kurangnya dukungan anggaran untuk pengembangan kapasitas internal

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab Jember Tahun 2025

2.2.1 Telaah Visi, Misi Kabupaten Jember

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 yaitu:

"DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU"

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam pembuatan program dan kegiatan. Adapun ke 5 (lima) misi pembangunan tersebut :

- Misi 1.** Mengentaskan kemiskinan dan perlindungan sosial yang merata.
- Misi 2.** Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, unggul, dan setara.
- Misi 3.** Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.
- Misi 4.** Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan penataan kota yang berbasis pembangunan berkelanjutan.
- Misi 5.** Percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan penguatan ketahanan pangan.

Dari lima misi tersebut, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tupoksi Bapperida Kabupaten Jember adalah terkait pada Misi ke- 3 yaitu; Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.

Tabel 2.8 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Misi ke 3: Membangun Birokrasi yang profesional, humanis dan melayani melalui penguatan berbagai regulasi yang adaptif, inovatif dan berkeadilan serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> a. Komitmen pimpinan terhadap perencanaan berbasis data b. Ketersediaan platform digital seperti SIPD dan SIPPD c. Adanya forum Musrenbang dan koordinasi lintas perangkat daerah d. Ketersediaan indikator makro pembangunan dan sistem monitoring e. Kesadaran untuk meningkatkan outcome pembangunan daerah f. Arah kebijakan nasional dan daerah mendorong penguatan riset terapan g. Dukungan visi dan misi daerah terhadap birokrasi inovatif dan adaptif 	<ul style="list-style-type: none"> a. Data sektoral tidak mutakhir atau tidak tersedia b. Keterbatasan kompetensi teknis SDM dalam perencanaan berbasis evidence. c. Forum koordinasi belum berjalan efektif dan tidak produktif d. Indikator kinerja dalam dokumen perencanaan belum tajam dan terukur. e. Sistem monev belum fokus pada hasil (outcome), masih administratif f. Tidak adanya sinergi dengan lembaga riset/ perguruan tinggi g. Budaya birokrasi masih konservatif dan resistensi terhadap perubahan

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		h. Tersedianya ruang pengembangan inovasi internal OPD i. Tersedianya sistem akuntabilitas kinerja seperti LAKIP dan SAKIP j. Adanya keterlibatan stakeholders dalam perencanaan. k. Dukungan misi daerah terhadap profesionalisme, teknologi, dan pelayanan publik l. Semangat ASN yang terbuka terhadap inovasi dan digitalisasi	h. Belum ada sistem penghargaan dan insentif bagi pelaku inovasi i. Evaluasi belum menyentuh efektivitas program dan belum partisipatif j. Feedback dari masyarakat dan akademisi belum dimanfaatkan secara optimal k. Tidak ada kurikulum pelatihan berkelanjutan dan pelatihan belum merata l. Keterbatasan anggaran dan akses untuk pengembangan kapasitas SDM

2.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

2.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Lembaga

Tabel 2.9 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
K/L belum mempublikasikan Renstra	-	-	-

2.3.2 Telaahan Renstra Provinsi

Tabel 2.10 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi Jawa Timur

Sasaran Renstra Provinsi Jawa timur	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi Jawa Timur	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya Capaian Program Pembangunan	Perencanaan program pembangunan belum sepenuhnya berbasis	Tersedianya aplikasi pendukung perencanaan (SIPD, SIPP) yang dapat	Data sektoral dari OPD belum terintegrasi dan belum

Sasaran Renstra Provinsi Jawa timur	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi Jawa Timur	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
	data yang akurat dan terkini	digunakan untuk menyusun rencana berbasis data	diperbarui secara berkala
	Sinkronisasi program antara kabupaten dan provinsi belum optimal	Terselenggaranya forum koordinasi seperti Musrenbang dan Rakor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan	Kurangnya mekanisme pengendalian dan monitoring terhadap keselarasan antara program kabupaten dan provinsi
	Evaluasi capaian pembangunan belum digunakan secara maksimal untuk perbaikan perencanaan	Tersedianya dokumen evaluasi seperti LKPJ, LKJIP, dan laporan monev tahunan	Kurangnya SDM yang memiliki kapasitas teknis dalam analisis evaluasi berbasis indikator kinerja
Berdayagunanya Hasil Riset dan Inovasi dalam Perumusan Kebijakan	Hasil riset belum dimanfaatkan secara optimal dalam perumusan kebijakan daerah	BAPPERIDA memiliki kewenangan dan fungsi riset serta inovasi daerah	Belum ada regulasi teknis yang mewajibkan integrasi hasil riset dalam proses penyusunan kebijakan
	Kolaborasi dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi masih terbatas	Terdapat sejumlah perguruan tinggi dan lembaga riset di wilayah Jember yang potensial untuk diajak kerja sama	Belum terbangunnya skema kemitraan riset yang berkelanjutan antara pemerintah daerah dan lembaga riset
	Inovasi daerah belum berkembang secara sistematis dan berkelanjutan	Adanya dukungan kebijakan dari pusat dan provinsi terkait penguatan inovasi daerah	Keterbatasan anggaran untuk kegiatan riset dan inovasi di tingkat daerah

2.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

2.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun (2015) tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Jember 2015 - 2035. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Jember adalah “mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang berbasis agribisnis di dukung oleh pertanian berkelanjutan, pariwisata dan usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal”.

Untuk mewujudkan visi demikian, ditetapkan kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah sebagai berikut :

- 1) Keseimbangan pemerataan antar wilayah;
- 2) Kualitas pemanfaatan ruang yang berkelanjutan;
- 3) Keseimbangan pertumbuhan ekonomi;
- 4) Pengembangan Agribisnis, Pariwisata dan Usaha Ekonomi Produktif berbasis potensi lokal;
- 5) Penataan kembali kawasan lindung di seluruh wilayah; dan
- 6) Optimalisasi potensi sumber daya wilayah

Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan urusan penunjang bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, Bapperida Kabupaten Jember dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.11 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah ditinjau dari implikasi RTRW

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Keselarasan perencanaan pembangunan dengan dengan arah pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam RTRW	RTRW menyediakan arah spasial yang jelas bagi penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, dan Renstra PD	terdapat perbedaan antara kebutuhan pembangunan dengan ketersediaan ruang
2.	RTRW menjadi dasar dalam pengembangan program riset terapan berbasis potensi wilayah	Dukungan kebijakan untuk mengembangkan kawasan strategis dan inovasi berbasis ruang	Masih terbatasnya data spasial terintegrasi untuk mendukung riset berbasis wilayah
3	Usulan program/kegiatan Perangkat Daerah maupun investasi swasta sesuai dengan arahan zonasi RTRW	RTRW berfungsi sebagai acuan untuk mengendalikan kesesuaian program pembangunan dan investasi dengan tata ruang	perbedaan prioritas antar Perangkat Daerah yang mengakibatkan ketidaksinkronan dalam pemanfaatan ruang

Telaah RTRW Kabupaten Jember terhadap tugas pokok dan fungsi Bapperida Kabupaten Jember menunjukkan bahwa dokumen tata ruang ini telah menjadi faktor pendorong utama dalam memastikan arah perencanaan, penelitian, dan pengendalian pembangunan daerah lebih terarah dan berbasis potensi wilayah. Kejelasan struktur dan pola ruang mendorong konsistensi dokumen perencanaan, pengembangan inovasi berbasis potensi lokal, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Namun demikian, dinamika pemanfaatan ruang yang sering tidak sejalan dengan RTRW, keterbatasan data spasial, serta koordinasi lintas perangkat daerah yang belum optimal masih menjadi faktor penghambat yang perlu diantisipasi. Secara keseluruhan, RTRW berperan penting sebagai instrumen integrasi pembangunan, meskipun efektivitasnya sangat ditentukan oleh kemampuan Bapperida dalam mengawal implementasi, melakukan pemutakhiran data, dan memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan.

2.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.12 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah ditinjau dari implikasi KLHS

No	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Dasar kebijakan, rencana, dan program yang disusun tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.	tuntutan agar pembangunan daerah memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan mendorong KLHS menjadi instrumen utama dalam perencanaan	Perbedaan prioritas antar Perangkat Daerah dapat menghambat sinkronisasi hasil KLHS dalam perencanaan
2	Tersedianya basis data dan analisis lingkungan yang dapat dijadikan pijakan riset tematik, misalnya riset mitigasi bencana, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, dan inovasi pembangunan hijau.	KLHS menyediakan basis data lingkungan yang dapat memperkuat perumusan kebijakan berbasis bukti (<i>evidence-based policy</i>)	Masih ada kesenjangan data spasial maupun tematik untuk mendukung analisis KLHS secara komprehensif

2.5 Penentuan isu-isu strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Identifikasi permasalahan dan isu strategis Renstra Bapperida Tahun 2025-2029 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.13 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Potensi SDM Perencana dan Jaringan Akademik	Kualitas perencanaan belum optimal karena kompetensi SDM dan minimnya pemanfaatan riset	Keterbatasan integrasi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam dokumen perencanaan	Kebutuhan perencanaan pembangunan yang mendukung tujuan SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)	Tuntutan implementasi Evidence-Based Policy (EBP) oleh Bappenas di seluruh daerah	Dorongan kolaborasi riset dan inovasi antar kabupaten/kota di wilayah Tapal Kuda	Peningkatan kapasitas perencana melalui pelatihan berkelanjutan dan pemanfaatan riset lokal sebagai dasar perencanaan
Pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana digitalisasi perencanaan	Dokumen perencanaan belum berbasis data terkini dan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil	Kurangnya data spasial dan sosial-ekologis yang terintegrasi dalam pengambilan keputusan	Transformasi digital dan open government sebagai tuntutan global	Perintah percepatan digitalisasi sistem pemerintahan dan data terbuka dari Presiden RI	Ketimpangan data antar perangkat daerah di Jawa Timur dalam pengambilan kebijakan	Penguatan sistem data perencanaan berbasis digital dan integrasi dengan kebijakan berbasis spasial

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Potensi sinergi riset terapan dan inovasi bersama perguruan tinggi dan swasta	Hasil riset dan inovasi belum dimanfaatkan sebagai dasar kebijakan publik	Rendahnya integrasi hasil riset lingkungan dalam RPJMD dan Renstra OPD	Adaptasi terhadap perubahan iklim melalui inovasi teknologi ramah lingkungan	Penguatan ekosistem riset dan inovasi dalam RPJMN 2025-2029	Rendahnya anggaran riset daerah dan kolaborasi dengan kampus di wilayah se-Karesidenan Besuki	Institusionalisasi pemanfaatan hasil riset dan inovasi lokal dalam siklus perencanaan dan penganggaran
Keterbukaan Partisipasi Publik sebagai sarana menjangkau masukan kebijakan	Evaluasi dan feedback dari stakeholder belum digunakan secara optimal dalam perencanaan	Kurangnya akomodasi kepentingan masyarakat terdampak dalam analisis kebijakan	Tuntutan partisipasi inklusif dalam perencanaan berbasis hak masyarakat dan lingkungan	Kebijakan nasional mendorong penyusunan dokumen perencanaan yang inklusif dan responsif gender	Kurangnya kesetaraan akses informasi publik antardaerah di Jawa Timur	Penguatan mekanisme evaluasi partisipatif berbasis komunitas dan akademisi untuk memperbaiki kualitas perencanaan
Dukungan regulatif dan semangat inovasi yang sudah mulai tumbuh	Inovasi belum menjadi budaya kerja dan belum sistematis diadopsi dalam birokrasi	Kurangnya kebijakan inovatif dalam menghadapi risiko lingkungan dan sosial jangka panjang	Desakan reformasi birokrasi adaptif dan inovatif untuk merespons ketidakpastian global	Kebijakan Smart ASN dan Sistem Merit menuntut peningkatan kompetensi inovatif ASN	Kompetisi inovasi antar daerah di Jawa Timur belum merata dampaknya terhadap kualitas layanan	Institusionalisasi inovasi daerah melalui regulasi, insentif, dan pengembangan kapasitas ASN

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan Visi bupati Kabupaten Jember yaitu “**Dengan Cinta Wujudkan Jember Baru Yang Lebih Sejahtera Dan Maju**“ dan dengan Misi yang telah ditetapkan, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah termasuk dalam Misi ke-3 yakni Membangun Birokrasi yang profesional, humanis dan melayani melalui penguatan berbagai regulasi yang adaptif, inovatif dan berkeadilan serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Baseline 2024	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
					1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)
	Meningkatnya Efektivitas Perencanaan dan Pencapaian Target Pembangunan Daerah dan Kualitas Inovasi Daerah		Indeks Inovasi Daerah (Indeks)	71,09	71,5	72	72,5	73	73,5
			Nilai SAKIP Area Perencanaan (Kabupaten) (Angka)	21,94	24,61	24,92	25,27	26,33	28,43
			Nilai SAKIP Area Pengukuran (Kabupaten) (Angka)	17,36	19,47	19,72	20,00	20,83	22,50
	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan dan capaian program Pembangunan daerah		Persentase Keselarasan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya (Persentase)	80	90	90	90	90	90
			Persentase PD dengan capaian program melebihi target (%)	73,33	75	77	79	80	80,5
	Meningkatnya kematangan Inovasi pembangunan daerah		Persentase Kematangan Inovasi Perangkat Daerah (%)	65	67	68	69	70	71
			Persentase Rekomendasi	100	100	100	100	100	100

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Baseline 2024	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
					1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)
			Kebijakan Berbasis Penelitian dan Pengembangan yang Diimplementasikan (%)						
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Bapperida) (Nilai)	80,71	81	82	83	84	85

Gambar 3.1 Cascading Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember

TUJUAN	Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Pencapaian Target Pembangunan Daerah dan Kualitas Inovasi Daerah						
INDIKATOR TUJUAN	Indeks Inovasi Daerah (Indeks)						
	Nilai SAKIP Area Perencanaan Kabupaten (Angka)						
	Nilai SAKIP Area Pengukuran Kabupaten (Angka)						
SASARAN	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan dan capaian program Pembangunan daerah			Meningkatnya kematangan Inovasi pembangunan daerah		Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	
INDIKATOR SASARAN	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	Persentase PD dengan capaian program melebihi target		Persentase Rekomendasi Kebijakan Berbasis Penelitian dan Pengembangan yang Diimplementasikan	Persentase Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	
PROGRAM	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Program Riset Dan Inovasi Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
INDIKATOR PROGRAM	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA		Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasandalam Implementasi Pembangunan Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	Inovasi Daerah yang dimanfaatkan Persentase Penelitian dan Kajian yang dimanfaatkan	Persentase Indikator Program yang tercapai Persentase Realisasi Anggaran Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	
BIDANG	Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Bidang Perekonomian dan SDA	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Bidang Riset dan Inovasi Daerah		Sekretariat

3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember.

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan

VISI : Dengan Cinta Wujudkan Jember Baru Yang Lebih Sejahtera Dan Maju
MISI : Membangun Birokrasi yang profesional, humanis dan melayani melalui penguatan berbagai regulasi yang adaptif, inovatif dan berkeadilan serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan		1. Strategi 1.1 Peningkatan Kualitas	1. Arah Kebijakan 1.1 Penguatan Koordinasi,

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Pencapaian Target Pembangunan Daerah dan Kualitas Inovasi Daerah	1. Sasaran 1.1 Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan dan capaian program Pembangunan daerah	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pembangunan Daerah melalui Penguatan Koordinasi, Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember
			2. Arah Kebijakan 1.2 Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten Jember
	2. Sasaran 2.1 Meningkatnya kematangan Inovasi pembangunan daerah	2. Strategi 2.1 Menyediakan rekomendasi kebijakan berbasis hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi sesuai kebutuhan di daerah	1. Arah Kebijakan 2.1 Fasilitasi pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi
			2. Arah Kebijakan 2.2 Menyusun rencana induk dan peta jalan pemajuan iptek
			3. Arah Kebijakan 2.3 Melakukan bimbingan teknis di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi
			4. Arah Kebijakan 2.4 Fasilitasi dan pembinaan untuk memberikan apresiasi prestasi inovasi
			5. Arah Kebijakan 2.5 Melakukan pendataan basis data riset dan inovasi
			6. Arah Kebijakan 2.6 Mempublikasikan hasil pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi pada jurnal ilmiah
			7. Arah Kebijakan 2.7 Melakukan diseminasi dan difusi hasil

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, serta invensi dan inovasi 8. Arah Kebijakan 2.8 Memfasilitasi pengurusan Hak Kekayaan Intelektual

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember. Program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember.

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN		
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>		
- Meningkatnya kualitas pelayanan Publik yang efektif dan inovatif. - Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya Efektifitas Perencanaan dan Pencapaian Target Pembangunan Daerah dan Kualitas Inovasi Daerah				Indeks Inovasi Daerah (Indeks)				
					Nilai SAKIP Area Perencanaan (Angka)				
					Nilai Sakip Area Pengukuran (Angka)				
		Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan dan capaian program Pembangunan daerah					Persentase Keselarasan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya (%)		
							Persentase PD dengan capaian program melebihi target (%)		
		Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah					Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (%)	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
				Meningkatnya Kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan yang dilaksanakan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan (dokumen)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik	
					Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	
					Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
					Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	5.01.02.2.01.0006 - Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
						Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pemanfaatan Data/Informasi yang digunakan untuk Perencanaan Daerah (%)	5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	5.01.02.2.02.0003 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kualitas Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah (Dokumen)	5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	5.01.02.2.04 - Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
					Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	5.01.02.2.04.0001 - Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen)	5.01.02.2.04.0003 - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan RKPD dan Renja		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
					Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Meningkatnya Kegiatan koordinasi lintas perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (Dokumen)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
				Meningkatnya Kegiatan koordinasi lintas perangkat daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA yang Dikoordinir (Dokumen)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	5.01.03.2.02.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	5.01.03.2.02.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	5.01.03.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	
				Terselenggaranya koordinasi lintas perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Dokumen)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	5.01.03.2.03.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	5.01.03.2.03.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	5.01.03.2.03.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	
		Meningkatnya kematangan Inovasi pembangunan daerah			Persentase Rekomendasi Kebijakan Berbasis Penelitian dan Pengembangan yang Diimplementasikan (%)		
					Persentase Kematangan Inovasi Perangkat Daerah (%)		
			Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan berbasis hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung perencanaan dan inovasi pembangunan daerah yang berkualitas.		Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan Daerah (%)	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan hukum yang dapat digunakan sebagai acuan rekomendasi kebijakan	Jumlah dokumen pengelolaan hasil penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan (dokumen)	5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)	5.05.02.2.01.0002 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	
					Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	5.05.02.2.01.0012 - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	
				Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan yang dapat digunakan sebagai acuan perumusan kebijakan berbasis evidence	Jumlah dokumen pengelolaan hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan (dokumen)	5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	5.05.02.2.02.0001 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dokumen)	5.05.02.2.02.0005 - Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)	5.05.02.2.02.0006 - Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dokumen)	5.05.02.2.02.0008 - Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Dokumen)	5.05.02.2.02.0010 - Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	
				Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dapat digunakan sebagai acuan perumusan kebijakan berbasis evidence	Jumlah dokumen pengelolaan hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)	5.05.02.2.03.0001 - Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)	5.05.02.2.03.0002 - Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (Dokumen)	5.05.02.2.03.0003 - Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	5.05.02.2.03.0004 - Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	5.05.02.2.03.0005 - Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)	5.05.02.2.03.0007 - Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen)	5.05.02.2.03.0009 - Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Dokumen)	5.05.02.2.03.0010 - Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan (Dokumen)	5.05.02.2.03.0012 - Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	
				Meningkatnya kualitas inovasi daerah yang dapat diimplementasikan untuk peningkatan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi (Dokumen)	5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	5.05.02.2.04.0001 - Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	5.05.02.2.04.0004 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)	5.05.02.2.04.0005 - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
			Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan berbasis hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan serta invensi dan inovasi		Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (%)	5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
				Meningkatnya Kualitas Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Jumlah Laporan Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan (Laporan)	5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
					Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	5.05.03.2.01.0001 - Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
				Meningkatnya Kualitas Invensi dan Inovasi	Jumlah Laporan Invensi dan Inovasi (Laporan)	5.05.03.2.02 - Invensi dan Inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi (Laporan)	5.05.03.2.02.0002 - Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) (Laporan)	5.05.03.2.02.0006 - Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	5.05.03.2.02.0012 - Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	
					Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (Sistem Informasi)	5.05.03.2.02.0013 - Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	
					Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi (Laporan)	5.05.03.2.02.0016 - Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	
					Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi (Pelatihan)	5.05.03.2.02.0018 - Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)		
			Meningkatnya efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah		Persentase Indikator Program yang tercapai (%)	5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase Realisasi Anggaran (%)	5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah (Angka)	5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang akuntabel dan terintegrasi	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Meningkatnya Kualitas dokumen pertanggungjawaban keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan Pertanggungjawaban keuangan (laporan)	5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian (dokumen)	5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Meningkatnya kualitas dukungan administratif operasional kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa (laporan)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Meningkatnya kualitas pengadaan barang secara efisien dan sesuai kebutuhan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (laporan)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
						Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya kualitas jasa pendukung operasional perangkat daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terjaganya kondisi barang milik daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab Jember Tahun 2025

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.01 - PERENCANAAN						14.496.907.685,34		17.333.275.928,30		18.787.330.654,93		20.434.825.140,69		22.169.478.501,47		
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						10.628.136.485,34		11.729.156.154,50		12.873.678.259,04		14.111.340.251,38		15.485.119.454,68		
Meningkatnya efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai (%)	80	81	82	10.628.136.485,34	83	11.729.156.154,50	84	12.873.678.259,04	85	14.111.340.251,38	86	15.485.119.454,68	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
	Persentase Realisasi Anggaran (%)	57,56	60	61		62	63	64	65							
	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah (Angka)	84,4	85	88		89	90	91	92							
5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						86.891.100		67.608.992		74.369.891,20		81.806.880,32		89.987.568,35		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang akuntabel dan terintegrasi	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8		8	86.891.100	8	67.608.992	8	74.369.891,20	8	81.806.880,32	8	89.987.568,35		
5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						61.598.000		31.039.888		34.143.876,80		37.558.264,48		41.314.090,93		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	2		2	61.598.000	2	31.039.888	2	34.143.876,80	2	37.558.264,48	2	41.314.090,93		
5.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						15.404.800		30.695.401		33.764.941,10		37.141.435,21		40.855.578,73		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	1		1	15.404.800	1	30.695.401	1	33.764.941,10	1	37.141.435,21	1	40.855.578,73		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						2.890.300		1.652.013		1.817.214,30		1.998.935,73		2.198.829,30		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	2		2	2.890.300	1	1.652.013	1	1.817.214,30	1	1.998.935,73	1	2.198.829,30		
5.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						6.998.000		4.221.690		4.643.859		5.108.244,90		5.619.069,39		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1	6.998.000	1	4.221.690	1	4.643.859	1	5.108.244,90	1	5.619.069,39		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.837.110.925,34		8.203.985.299,40		9.024.383.829,34		9.926.822.212,27		10.920.504.433,50		
Meningkatnya kualitas dokumen pertanggungjawaban keuangan perangkat daerah	Jumlah laporan Pertanggungjawaban keuangan (laporan)	18	18		18	6.837.110.925,34	18	8.203.985.299,40	18	9.024.383.829,34	18	9.926.822.212,27	18	10.920.504.433,50		
5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.525.710.925,34		7.859.135.299,40		8.645.048.829,34		9.509.553.712,27		10.460.509.083,50		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	291	291		291	6.525.710.925,34	291	7.859.135.299,40	291	8.645.048.829,34	291	9.509.553.712,27	291	10.460.509.083,50		
5.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						311.400.000		344.850.000		379.335.000		417.268.500		459.995.350		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	55	12		12	311.400.000	12	344.850.000	12	379.335.000	12	417.268.500	2	459.995.350		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						361.472.000		548.878.920		581.119.592		616.584.373,20		655.595.610,50		
Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN	Jumlah dokumen kelatausahaan dan kepegawaian (dokumen)	6	6		6	361.472.000	6	548.878.920	6	581.119.592	6	616.584.373,20	6	655.595.610,50		
5.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						135.000.000		113.560.920		124.916.992		137.408.713,20		151.149.584,50		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	2		2	135.000.000	2	113.560.920	2	124.916.992	2	137.408.713,20	2	151.149.584,50		
5.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						0		208.846.000		229.730.600		252.703.660		277.974.026		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4	0		0	0	4	208.846.000	4	229.730.600	4	252.703.660	4	277.974.026		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
5.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						226.472.000		226.472.000			226.472.000		226.472.000		226.472.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	185	100		160	226.472.000	160	226.472.000	160	226.472.000	160	226.472.000	160	226.472.000			
5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah						421.443.700		331.638.549			364.190.803,90		399.998.284,29		439.386.312,73		
Meningkatnya kualitas dukungan administratif operasional kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa (laporan)	12	12		12	421.443.700	12	331.638.549	12	364.190.803,90	12	399.998.284,29	12	439.386.312,73			
5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						11.136.500		6.154.786			6.770.264,60		7.447.291,06		8.191.820,17		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1	11.136.500	1	6.154.786	1	6.770.264,60	1	7.447.291,06	1	8.191.820,17		
5.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor						111.717.200		140.700,373		154.770,410,30		170.247,451,33		187,272.196,47		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12	111.717.200	12	140.700,373	12	154.770,410,30	12	170.247,451,33	12	187,272.196,47		
5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						6.116.000		6.116,000		6.116.000		6.116.000		6.116,000		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12			12	6.116.000	12	6.116,000	12	6.116.000	12	6.116.000	12	6.116,000		
5.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						4.500.000		5.445,000		5.989.500		6.588.450		7.247,295		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	24	24		24	4.500.000	24	5.445.000	24	5.989.500	24	6.588.450	24	7.247.295		
5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						272.924.000		155.011.890		170.513.079		187.564.386,90		206.320.825,59		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12	272.924.000	12	155.011.890	12	170.513.079	12	187.564.386,90	12	206.320.825,59		
5.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						15.050.000		18.210.500		20.031.550		22.034.705		24.238.175,50		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4	1		1	15.050.000	1	18.210.500	1	20.031.550	1	22.034.705	1	24.238.175,50		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						192.353.200		244.412.716			261.719.297,60		240.756.537,40		261.697.501,10		
Meningkatnya kualitas pengadaan barang secara efisien dan sesuai kebutuhan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (laporan)	12	12		12	192.353.200	12	244.412.716	12	261.719.297,60	12	240.756.537,40	12	261.697.501,10			
5.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel						31.346.900		31.346.900		31.346.900		31.346.900		31.346.900			
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0		20	31.346.900	20	31.346.900	20	31.346.900	20	31.346.900	20	31.346.900			
5.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						161.006.300		173.065.816		190.372.397,60		209.409.637,40		230.350.601,10			
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	15	5		4	161.006.300	15	173.065.816	15	190.372.397,60	15	209.409.637,40	15	230.350.601,10			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0		20.000.000		20.000.000		0		0		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0	0	1	20.000.000	1	20.000.000	0	0		0		
5.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0		20.000.000		20.000.000		0		0		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0	0	1	20.000.000	1	20.000.000	0	0	0	0		
5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.114.976.879		1.793.314.229,10		1.974.645.652		2.194.110.216,90		2.413.521.238,50		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya kualitas jasa pendukung operasional perangkat daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Laporan)	13	13		13	2.114.976.879	13	1.793.314.229,10	13	1.974.645.652	13	2.194.110.216,90	13	2.413.521.238,50		
5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						196.218.929		237.418.699,10		261.160.569		287.276.625,90		316.004.288,50		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12	196.218.929	12	237.418.699,10	12	261.160.569	12	287.276.625,90	12	316.004.288,50		
5.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						57.599.000		22.385.000		24.623.500		27.085.850		29.794.435		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12	57.599.000	1	22.385.000	1	24.623.500	1	27.085.850	1	29.794.435		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.861.158.950		1.533.510.530		1.688.861.583		1.879.747.741		2.067.722.515		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12	1.861.158.950	3	1.533.510.530	3	1.688.861.583	3	1.879.747.741	3	2.067.722.515		
5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						613.888.681		539.317.449		593.249.193		651.261.747		704.426.790		
Meningkatnya kualitas barang milik daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (laporan)	9	9		9	613.888.681	9	539.317.449	9	593.249.193	9	651.261.747	9	704.426.790		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						118.080.000		88.006.325		96.806.957		106.487.653		106.487.653		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1	118.080.000	1	88.006.325	1	96.806.957	1	106.487.653	1	106.487.653		
5.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						344.124.000		372.830.524		410.113.576		451.124.934		496.237.427		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	27	5		30	344.124.000	27	372.830.524	27	410.113.576	27	451.124.934	27	496.237.427		
5.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel						20.000.000		12.100.000		13.310.000		14.641.000		16.105.100		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	20	20		30	20.000.000	20	12.100.000	20	13.310.000	20	14.641.000	20	16.105.100		
5.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						65.225.800		54.450.000		59.895.000		65.884.500		72.472.950		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	50	55		50	65.225.800	50	54.450.000	50	59.895.000	50	65.884.500	50	72.472.950		
5.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						66.458.881		11.930.600		13.123.660		13.123.660		13.123.660		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0		1	66.458.881	1	11.930.600	1	13.123.660	1	13.123.660	1	13.123.660		
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						1.883.517.600		2.776.527.880		2.805.591.755		2.904.618.185		2.923.605.672		
Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPd (Persentase)	80	80		80,1	1.883.517.600	80,2	2.776.527.880	80,5	2.805.591.755	80,7	2.904.618.185	90	2.923.605.672	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						1.208.171.700		2.096.827.523		2.053.021.362		2.071.890.752		2.002.705.496		
Meningkatnya Kualitas Penyusunan Dokumen Perencanaan yang dilaksanakan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan (dokumen)	3	3		2	1.208.171.700	2	2.096.827.523	2	2.053.021.362	3	2.071.890.752	2	2.002.705.496		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik						54.980.000		54.980.000		54.980.000		54.980.000		54.980.000			
Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	2	2		1	54.980.000	1	54.980.000	1	54.980.000	2	54.980.000	1	54.980.000			
5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah						47.014.400		27.228.630		29.951.493		32.946.642		36.241.306			
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1		1	47.014.400	1	27.228.630	1	29.951.493	1	32.946.642	1	36.241.306			
5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota						331.968.300		523.657.992		576.023.791		633.626.170		696.988.787			
Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	1	1		1	331.968.300	1	523.657.992	1	576.023.791	1	633.626.170	1	696.988.787			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.01.02.2.01.0006 - Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan						44.951.000		44.951.000		44.951.000		44.951.000		44.951.000		
Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	31	31		31	44.951.000	31	44.951.000	31	44.951.000	31	44.951.000	31	44.951.000		
5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						729.258.000		1.446.009.901		1.347.115.078		1.305.386.940		1.169.544.403		
Ditetapkan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	3	3		3	729.258.000	2	1.446.009.901	2	1.347.115.078	3	1.305.386.940	2	1.169.544.403		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						281.493.000		162.756.478		184.032.126		207.435.339		233.178.873		
Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemanfaatan Data/Informasi yang digunakan untuk perencanaan daerah (%)	100	100	100	281.493.000	100	162.756.478	100	184.032.126	100	207.435.339	100	233.178.873			
5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah					110.250.000		18.896.069		25.785.676		33.364.244		41.700.668			
Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	1	1	1	110.250.000	1	18.896.069	1	25.785.676	1	33.364.244	1	41.700.668			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.01.02.2.02.0003 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						171.243.000		143.860.409		158.246.450		174.071.095		191.478.205		
Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	80			1	171.243.000	80	143.860.409	80	158.246.450	80	174.071.095	80	191.478.205		
5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						315.114.900		415.943.879		467.538.267		524.292.094		586.721.303		
Meningkatnya Kualitas Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah (Dokumen)	4	4		4	315.114.900	4	415.943.879	4	467.538.267	4	524.292.094	4	586.721.303		
5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah						315.114.900		415.943.879		467.538.267		524.292.094		586.721.303		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	4	4		4	315.114.900	4	415.943.879	4	467.538.267	4	524.292.094	4	586.721.303		
5.01.02.2.04 - Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah						78.738.000		101.000.000		101.000.000		101.000.000		101.000.000		
Meningkatnya Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	1	0		1	78.738.000	1	101.000.000	1	101.000.000	1	101.000.000	1	101.000.000		
5.01.02.2.04.0001 - Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah						78.738.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		1.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	1	1		1	78.738.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000		
5.01.02.2.04.0003 - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen)	442			392	0	150	100.000.000	150	100.000.000	150	100.000.000	150	100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						1.985.253.600		2.827.591.893,80		3.108.060.640,89		3.418.866.704,31		3.760.753.374,79		
Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan RKPD dan Renja	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	75	75		79	1.985.253.600	81	2.827.591.893,80	83	3.108.060.640,89	85	3.418.866.704,31	90	3.760.753.374,79	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	80	80		84		86		88		89		90			
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	70	70		79		83		86		88		90			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						688.255.400		935.448.247		1.026.702.629,70		1.129.372.892,71		1.242.310.182,02		
Meningkatnya Kegiatan koordinasi lintas perangkat daerah bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (dokumen)	6	6		6	688.255.400	6	935.448.247	6	1.026.702.629,70	6	1.129.372.892,71	6	1.242.310.182,02		
5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						189.660.800		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	28	0		4	189.660.800	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.01.03.2.01.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan						52.164.000		139.981.996		153.980.195,60		169.378.215,20		186.316.036,70		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	4			1	52.164.000	4	139.981.996	4	153.980.195,60	4	169.378.215,20	4	186.316.036,70		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					29.604.000			29.604.000		30.273.958		33.301.353,80		36.631.489,18		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	14	14		4	29.604.000	4	29.604.000	4	30.273.958	4	33.301.353,80	4	36.631.489,18		
5.01.03.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan					135.900.800			113.543.496		124.897.845,60		137.387.630,20		151.126.393,20		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	4			4	135.900.800	4	113.543.496	4	124.897.845,60	4	137.387.630,20	4	151.126.393,20		
5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						165.900.800		0		0		0		0		
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	22	22		22	165.900.800		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2025		2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
5.01.03.2.01.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					28.404.000			418.685.894			460.554.483,40			506.609.931,70			557.270.924,90	
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	4			4	28.404.000	4	418.685.894	4	460.554.483,40	4	506.609.931,70	4	557.270.924,90				
5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia					29.604.000			56.856.811			62.542.492,10			68.796.741,31			75.676.415,44	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	4			4	29.604.000	4	56.856.811	4	62.542.492,10	4	68.796.741,31	4	75.676.415,44		
5.01.03.2.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia						57.017.000		176.776.050		194.453.655		213.899.020,50		235.288.922,60		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	4	4		4	57.017.000	4	176.776.050	4	194.453.655	4	213.899.020,50	4	235.288.922,60		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						640.270.100		976.502.549		1.074.152.804		1.181.568.084		1.299.724.892		
Meningkatnya Kegiatan koordinasi lintas perangkat daerah bidang perekonomian dan sumber daya alam	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (dokumen)	6			6	640.270.100	6	976.502.549	6	1.074.152.804	6	1.181.568.084	6	1.299.724.892		
5.01.03.2.02.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian						10.800.000		32.815.200		36.096.720		39.706.392		43.677.031		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	7	7		4	10.800.000	7	32.815.200	7	36.096.720	7	39.706.392	7	43.677.031		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN			
			2025		2026		2027		2028		2029		2030						
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian					48.438.600			67.906.410			74.697.051			82.166.756			90.383.432		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	7	7	5	48.438.600	7	67.906.410	7	74.697.051	7	82.166.756	7	90.383.432						
5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian					177.739.900			519.072.092			570.979.301			628.077.231			690.884.954		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	7	7		5	177.739.900	7	519.072.092	7	570.979.301	7	628.077.231	7	690.884.954		
5.01.03.2.02.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA						49.992.000		22.982.740		25.281.014		27.809.115		30.590.027		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	5	5		5	49.992.000	5	22.982.740	5	25.281.014	5	27.809.115	5	30.590.027		
5.01.03.2.02.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA						58.906.800		34.074.689		37.482.158		41.230.374		45.353.411		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	5	5		5	58.906.800	5	34.074.689	5	37.482.158	5	41.230.374	5	45.353.411		
5.01.03.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA						294.392.800		299.651.418		329.616.560		362.578.216		398.836.037		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	5			5	294.392.800	4	299.651.418	4	329.616.560	4	362.578.216	4	398.836.037		
5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						656.728.100		915.641.097,80		1.007.205.207,19		1.107.925.727,60		1.218.718.300,77		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya Kegiatan koordinasi lintas perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan	Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Dokumen)	6	6		6	656.728.100	6	915.641.097,80	6	1.007.205.207,19	6	1.107.925.727,60	6	1.218.718.300,77		
5.01.03.2.03.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur						115.534.200		374.581.394		412.039.533		453.243.486		498.567.835		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	4	4		4	115.534.200	4	374.581.394	4	412.039.533	4	453.243.486	4	498.567.835		
5.01.03.2.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur						76.446.600		50.204.836		55.225.319,61		60.747.851,56		66.822.636,72		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	3	3		4	76.446.600	4	50.204.836	4	55.225.319,61	4	60.747.851,56	4	66.822.636,72		
5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur						99.979.600		80.319.316		88.351.247,60		97.186.372,36		106.905.009,60		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	4	4		4	99.979.600	4	80.319.316	4	88.351.247,60	4	97.186.372,36	4	106.905.009,60		
5.01.03.2.03.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan						95.732.500		97.054.100		106.759.510		117.435.461		129.179.007,10		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	4	4		4	95.732.500	4	97.054.100	4	106.759.510	4	117.435.461	4	129.179.007,10		
5.01.03.2.03.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan						100.386.600		48.993.626		53.892.988,60		59.282.287,46		65.210.516,21		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	4	4		4	100.386.600	4	48.993.626	4	53.892.988,60	4	59.282.287,46	4	65.210.516,21		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.01.03.2.03.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan						168.648.600		264.487.825,80		290.936.608,38		320.030.269,22		352.033.296,14		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	4			4	168.648.600		264.487.825,80		290.936.608,38		320.030.269,22		352.033.296,14		
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						2.249.999.800		1.660.000.000		1.655.000.000		1.715.500.000		1.782.050.000		
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						2.230.035.800		1.010.000.000		1.005.000.000		1.065.500.000		1.132.050.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan berbasis hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung perencanaan dan inovasi pembangunan daerah yang berkualitas	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan Daerah (%)	66,65	66,65		67	2.230.035.800	68	1.010.000.000	69	1.005.000.000	70	1.065.500.000	71	1.132.050.000	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan						870.143.800		160.000.000		171.000.000		183.100.000		196.410.000		
Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan hukum yang dapat digunakan sebagai acuan rekomendasi kebijakan	Jumlah dokumen pengelolaan hasil penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan (dokumen)	0	0		1	870.143.800	1	160.000.000	1	171.000.000	1	183.100.000	1	196.410.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.05.02.2.01.0002 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum						0		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000		
Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)	0	0		0	0	1	110.000.000	1	121.000.000	1	133.100.000	1	146.410.000		
5.05.02.2.01.0012 - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan						870.143.800		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan dengan Baik	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	2	2		2	870.143.800	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan						800.000.000		440.000.000		484.000.000		532.400.000		585.640.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan yang dapat digunakan sebagai acuan perumusan kebijakan berbasis evidence	Jumlah dokumen pengelolaan hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan (dokumen)	1	1		1	800.000.000	1	440.000.000	1	484.000.000	1	532.400.000	1	585.640.000		
5.05.02.2.02.0001 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial						0		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	0	0		1	0	1	110.000.000	1	121.000.000	1	133.100.000	1	146.410.000		
5.05.02.2.02.0005 - Penelitian dan Pengembangan Pariwisata						200.000.000		0		0		0		0		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dokumen)	0	0		1	200.000.000		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.05.02.2.02.0006 - Penelitian dan Pengembangan Kesehatan						0		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)	0	0		0	0	1	110.000.000	1	121.000.000	1	133.100.000	1	146.410.000		
5.05.02.2.02.0008 - Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						0		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dokumen)	0	0		0	0	1	110.000.000	1	121.000.000	1	133.100.000	1	146.410.000		
5.05.02.2.02.0010 - Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat						600.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Dokumen)	5	5		6	600.000.000	5	110.000.000	5	121.000.000	5	133.100.000	5	146.410.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan						559.892.000		60.000.000					0		0		
Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dapat digunakan sebagai acuan perumusan kebijakan berbasis evidence	Jumlah dokumen pengelolaan hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan (dokumen)	0	0		1	559.892.000	1	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0		
5.05.02.2.03.0001 - Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						0		60.000.000					0		0		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)	0	0			0	1	60.000.000					0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
5.05.02.2.03.0002 - Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan						200.000.000		0			0		0		0		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)	0	0		1	200.000.000		0			0		0		0		
5.05.02.2.03.0003 - Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah						9.982.000		0			0		0		0		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (Dokumen)	0	0		1	9.982.000		0			0		0		0		
5.05.02.2.03.0004 - Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan						300.000.000		0			0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	0	0		1	300.000.000		0		0		0		0			
5.05.02.2.03.0005 - Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan						9.982.000		0		0		0		0			
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	0	0		1	9.982.000		0		0		0		0			
5.05.02.2.03.0007 - Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup						9.982.000		0		0		0		0			
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)	0	0		1	9.982.000		0		0		0		0			
5.05.02.2.03.0009 - Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum						9.982.000		0		0		0		0			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen)	0	0		1	9.982.000		0		0		0		0		
5.05.02.2.03.0010 - Penelitian dan Pengembangan Perhubungan						9.982.000		0		0		0		0		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Dokumen)	0	0		1	9.982.000		0		0		0		0		
5.05.02.2.03.0012 - Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan						9.982.000		0		0		0		0		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan (Dokumen)	0	0		1	9.982.000		0		0		0		0		
5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi						0		350.000.000		350.000.000		350.000.000		350.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya kualitas inovasi daerah yang dapat diimplementasikan untuk peningkatan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi (Dokumen)	0	0		0	0	1	350.00 0.000	1	350.000.0 00	1	350.000.0 00	1	350.00 0.000		
5.05.02.2.04.0001 - Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi						0		150.00 0.000		150.000.0 00		150.000.0 00		150.00 0.000		
Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	0	0		0	0	1	150.00 0.000	1	150.000.0 00	1	150.000.0 00	1	150.00 0.000		
5.05.02.2.04.0004 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan						0		100.00 0.000		100.000.0 00		100.000.0 00		100.00 0.000		
Terseleenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	0	0		0	0	3	100.00 0.000	3	100.000.0 00	3	100.000.0 00	3	100.00 0.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.05.02.2.04.0005 - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual						0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)	0	0		0	0	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000		
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH						19.964.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000		
Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan berbasis hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan serta inovasi dan inovasi	Persentase Inovasi Daerah yang Dimanfaatkan (%)	80	80		85	19.964.000	87	650.000.000	90	650.000.000	92	650.000.000	95	650.000.000	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	
5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan						9.982.000		0		0		0		0		
Meningkatnya Kualitas Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Jumlah Laporan Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan (Laporan)	0	0		1	9.982.000	0	0	0	0	0	0	0	0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.05.03.2.01.0001 - Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan						9.982.000		0		0		0		0		
Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	0	0		1	9.982.000		0		0		0		0		
5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi						9.982.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000		
Meningkatnya Kualitas Inovasi dan Inovasi	Jumlah Laporan Inovasi dan Inovasi (Laporan)	0	0		1	9.982.000	1	650.000.000	1	650.000.000	1	650.000.000	1	650.000.000		
5.05.03.2.02.0002 - Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi						0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi (Laporan)	0	0			0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
5.05.03.2.02.0006 - Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual						9.982.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000			
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) (Laporan)	0	0		1	9.982.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000			
5.05.03.2.02.0012 - Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi						0		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000			
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	0	0		0	0		150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
5.05.03.2.02.0013 - Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah						0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000			
Terlaksananya pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (Sistem Informasi)	0	0		0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000			
5.05.03.2.02.0016 - Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi						0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000			
Terlaksananya pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi (Laporan)	0	0		0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
5.05.03.2.02.0018 - Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi						0		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000			
Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi (Pelatihan)	0	0	0	0	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000				

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah			
				<i>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</i>	
				Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	
				Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	
				Pelaksanaan Konsultasi Publik	
				Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah	
				Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
				Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
				<i>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	
				Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	
				Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			<i>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	
			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	
			Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
			<i>Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</i>	
			Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
			Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
			Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan RKPD dan Renja		
			<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan berbasis hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung perencanaan dan inovasi pembangunan daerah yang berkualitas		
			<i>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</i>	
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	
			Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	
			Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	
			Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	
			Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	
			Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	
			Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	
			Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	
			Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	
			Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	
			Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	
			Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
			Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
			Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	
			Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	
			Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	
			Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	
			Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	
			Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	
			Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	
			Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	
			Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	
			Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	
			<i>Pengembangan Inovasi dan Teknologi</i>	
			Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
			Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
			Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
			Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan	
			Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	
	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan berbasis hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan serta inovasi dan inovasi		

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			<i>Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan</i>	
			Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
			Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	
			Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
			Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
			Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
			Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	
			<i>Invensi dan Inovasi</i>	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	
			Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	
			Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	
			Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
			Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	
			Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	
			Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	
			Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	

- Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui Indikator Kineija Utama (IKU).
- Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi.
- Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).
- IKU dan IKK berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	71,5	72	72,5	73	73,5	74	
2	Nilai SAKIP Area Perencanaan	Angka	24,61	24,92	25,27	26,33	28,43	24,61	
3	Nilai SAKIP Area Pengukuran	Angka	19,47	19,72	20,00	20,83	22,50	19,47	

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	80	80,05	80,1	80,15	80,2	80,25	

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Lainnya

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	%	67	68	69	70	71	72	
2	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	%	90	90	90	90	90	90	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Jember.

Jember, 2025
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Jember

TTD.

ARIEF TYAHYONO, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19661015 199602 1 001